

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS*

Oleh

DILLA JANU ISTANTI

Resolusi konflik Papua melalui berbagai kebijakan belum mampu mengantarkan Papua menuju kondisi damai. Penelitian ini bertujuan menawarkan pendekatan berbeda dalam resolusi konflik Papua melalui pemikiran Habermas dengan menggunakan *the theory of communicative action*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui *critical discourse analysis* Norman Fairclough. Gagasan utama pemikiran Habermas menitikberatkan pada komunikasi intersubjektif dan mengkritisi komunikasi instrumental dalam mencapai sebuah kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih kerap melakukan penyelesaian konflik Papua dengan menggunakan komunikasi instrumental. Praktik diskursif yang muncul masih memperlihatkan dominasi kekuasaan dalam penyelesaian konflik. Hal ini terlihat dari pidato presiden yang secara tegas memerintahkan TNI Polri untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatisme dalam merespon konflik akibat penyerangan para pekerja Trans-Papua dan pers release resmi pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD yang menetapkan KKB Papua sebagai terorisme. Resolusi konflik yang dilakukan belum sampai pada titik komunikatif. Tindakan komunikatif yang digagas Habermas melalui komunikasi intersubjektif dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik Papua.

Kata kunci : *communicative action*, resolusi konflik, Papua.

## **ABSTRACT**

### **PERSFEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS***

**By**

**DILLA JANU INSTANTI**

Resolution of the Papuan conflict through various policies has not been able to bring Papua to a peaceful condition. This study aims to offer a different approach in Papua conflict resolution through Habermas's thinking by using the theory of communicative action. The research method used is qualitative through the critical discourse analysis of Norman Fairclough. The main idea of Habermas's thinking focuses on intersubjective communication and criticizes instrumental communication in reaching an agreement. The results of the study show that the government still often resolves the Papuan conflict by using instrumental communication. The emerging discursive practice still shows the dominance of power in conflict resolution. This can be seen from the president's speech which explicitly ordered the TNI and Polri to pursue separatist groups in response to the conflict due to attacks by Trans-Papuan workers and the government's official press release through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD which declared the Papuan KKB as terrorism. Conflict resolution has not yet reached a communicative point. The communicative action initiated by Habermas through intersubjective communication can be an alternative for resolving the Papuan conflict.

Keywords: communicative action, conflict resolution, Papua